



Potensi

# USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI LAMPUNG





Potensi

# USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI LAMPUNG



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL PROVINSI LAMPUNG  
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: 978-602-7746-16-9  
No. Publikasi: 18550.1808  
No. Katalog: 9102067.18

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm  
Jumlah Halaman: vi + 32 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Lampung

Penyunting: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi Lampung

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi Lampung

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tata Letak: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi Lampung

Sumber Ilustrasi: [www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

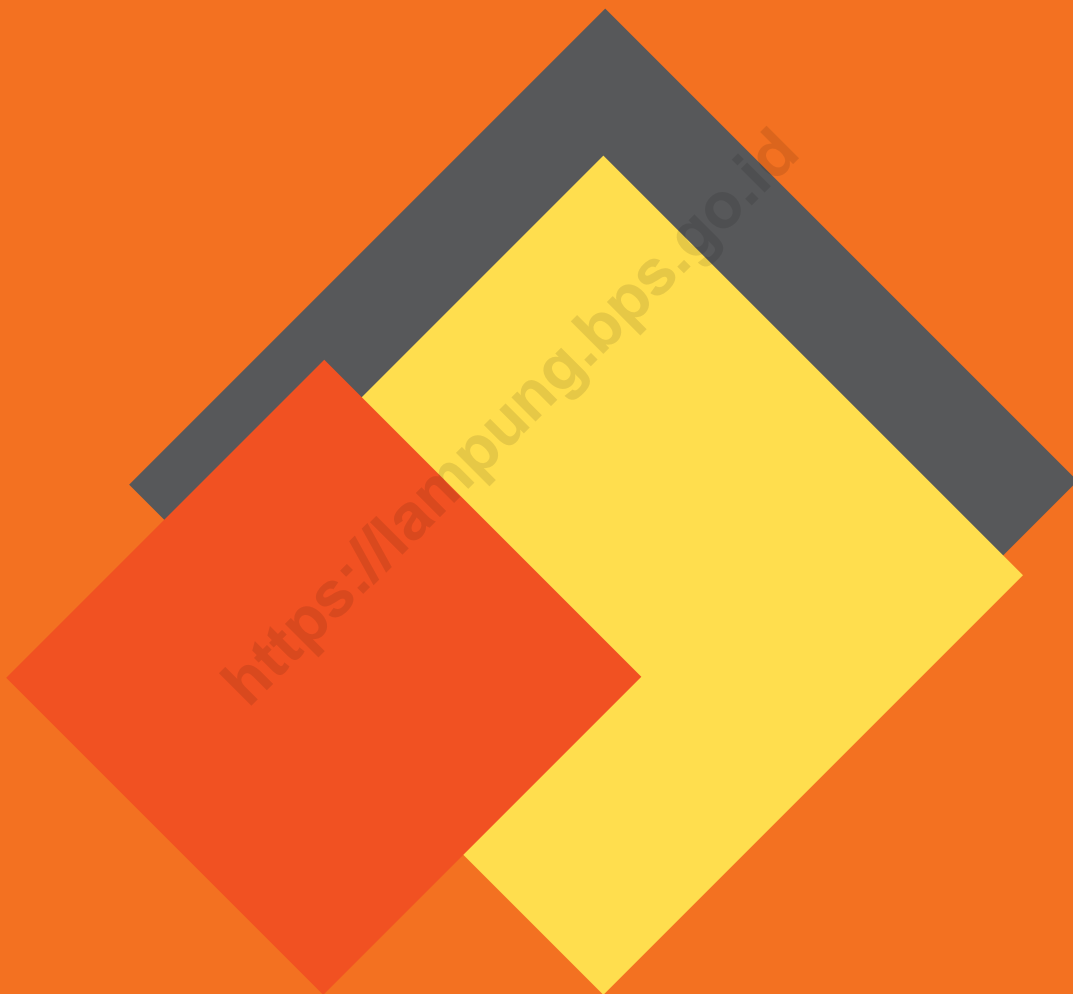
Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Bandar Lampung, Desember 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Lampung

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yeane Irmaningrum S'. The signature is fluid and cursive.

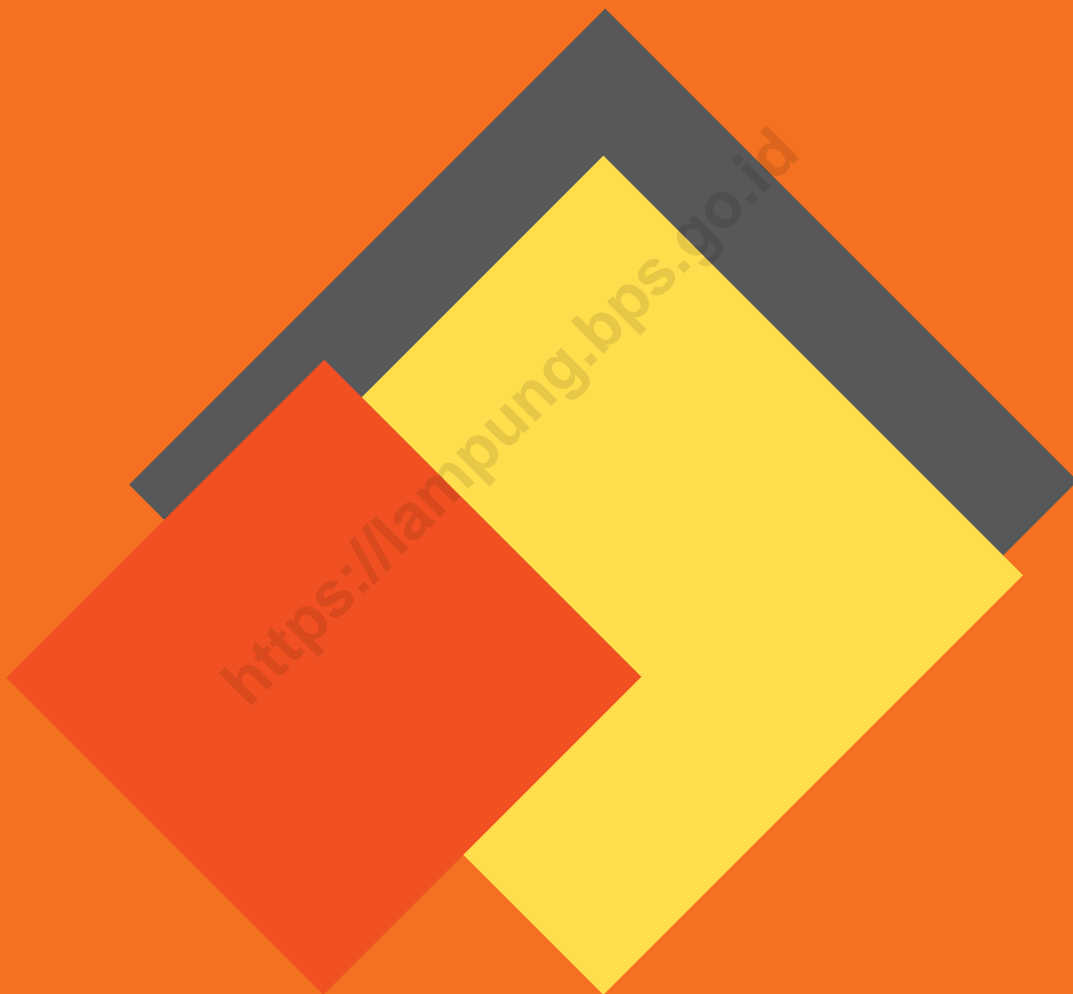
Yeane Irmaningrum S



<https://lampung.bps.go.id>

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPABILITAS	17
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	21
PROSPEK DAN KENDALA USAHA	27



<https://lampung.bps.go.id>



# Pendahuluan

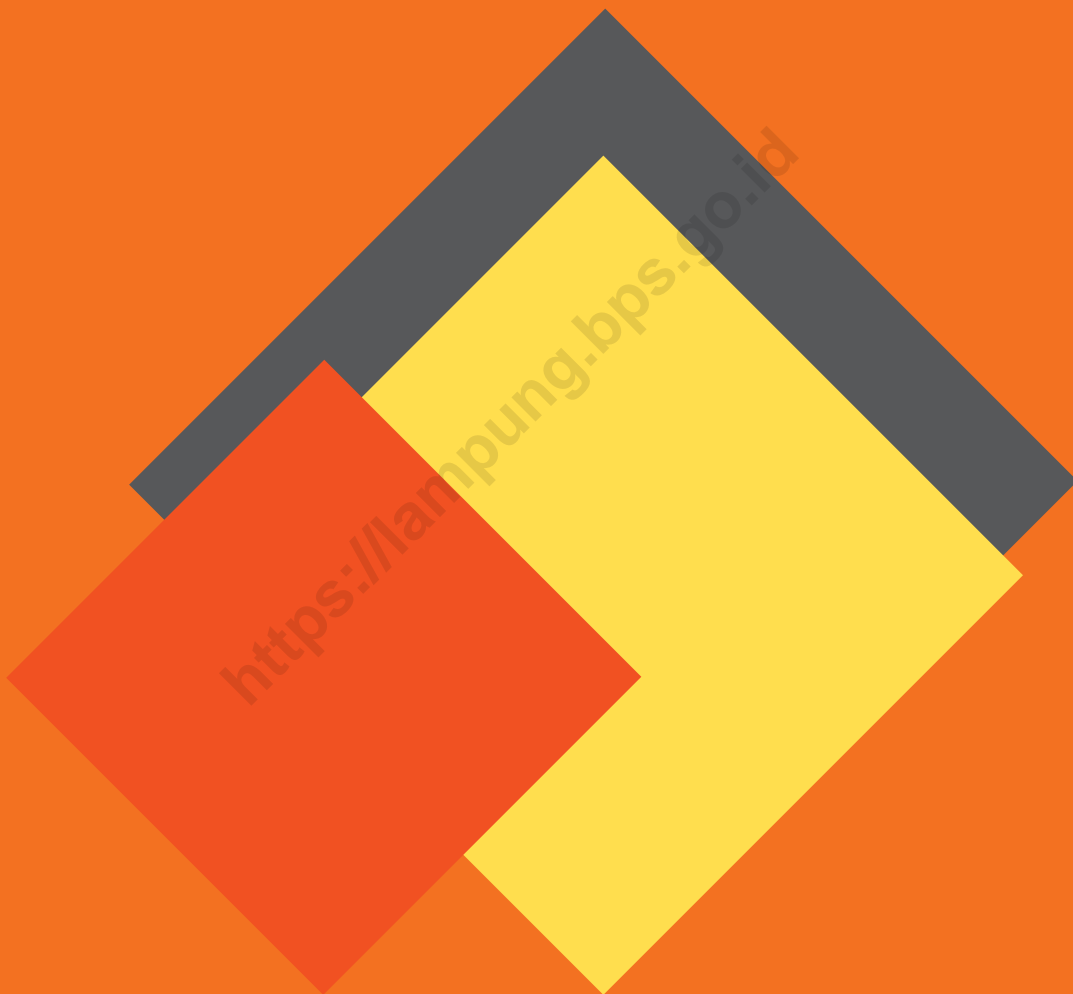
Dunia usaha di Provinsi Lampung pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 770 ribu usaha atau 99,17 persen dari total usaha nonpertanian di Lampung. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,67 juta orang atau sekitar 87,81 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Lampung, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK



<https://lampung.bps.go.id>

---

**UMK**  
**MENDOMINASI**  
**JUMLAH**  
**USAHA DI**  
**PROVINSI**  
**LAMPUNG**

---

Bagian

1

<https://lampung.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Lampung. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Provinsi Lampung mencapai 99,17 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar lebih dari 443 ribu usaha atau mencapai lebih dari 50 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing berkontribusi lebih dari 10 persen.

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Bandar Lampung menjadi pusat pergerakan ekonomi di Lampung. Dari 15 kabupaten/kota, jumlah UMK di Kota Bandar Lampung mencapai 14,90 persen. Pada posisi kedua dan ketiga, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur masing-masing sebesar 14,85% dan 14,37 persen.

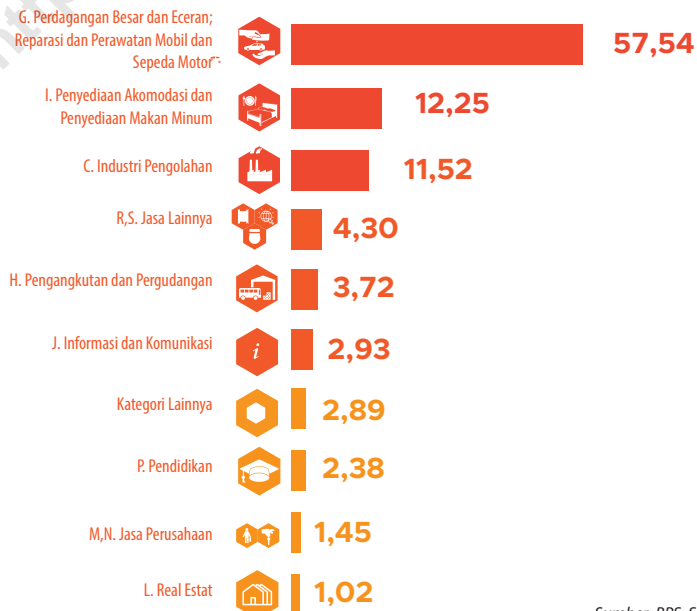
**UMK  
MENDOMINASI  
JUMLAH  
USAHA DI  
PROVINSI  
LAMPUNG**

**Gambar 1.1.**  
**Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Gambar 1.2.**  
**Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Tabel 1.**  
**Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Lampung Barat	24 266	3,15
Tanggamus	50 012	6,49
Lampung Selatan	81 981	10,64
Lampung Timur	110 709	14,37
Lampung Tengah	114 403	14,85
Lampung Utara	54 102	7,02
Way Kanan	35 454	4,60
Tulang Bawang	33 529	4,35
Pesawaran	40 686	5,28
Pringsewu	39 715	5,15
Mesuji	16 417	2,13
Tulang Bawang Barat	20 836	2,70
Pesisir Barat	10 575	1,37
Bandar Lampung	114 809	14,90
Metro	23 138	3,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



---

**UMK  
SEBAGAI  
PENYERAP  
TENAGA KERJA  
TERBANYAK**

---

Bagian

**2**

<https://lampung.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Provinsi Lampung tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, pengangguran di Provinsi Lampung mencapai 4,33 persen, terbanyak pada lulusan SMA yang mencapai lebih dari 31 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMA terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Lampung, salah satu disebabkan rendahnya keahlian *soft skill* lulusan SMA khususnya di SMA yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMA, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMP yang mencapai 21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

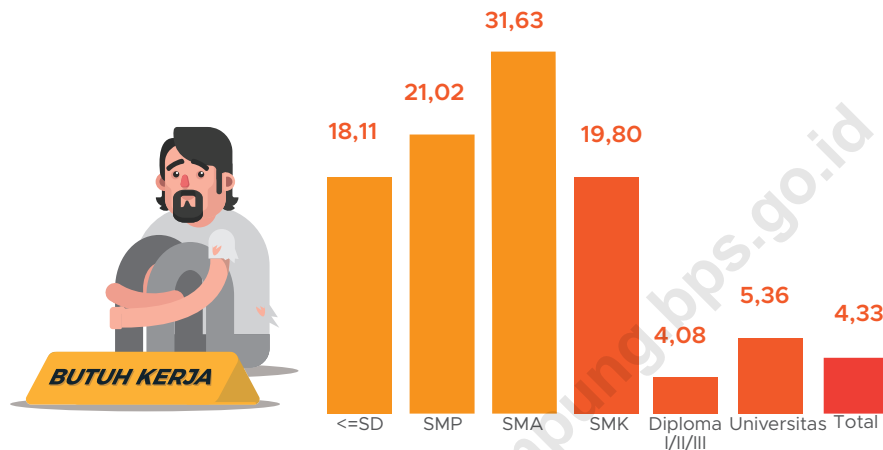
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 1,67 juta tenaga kerja nonpertanian di Provinsi Lampung.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mencapai hampir setengah dari tenaga kerja pada UMK secara keseluruhan. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan Pendidikan (Kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK. Secara-rata-rata per usaha, aktivitas Pendidikan (Kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 11 pekerja per usaha. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Provinsi Lampung hanya sebesar 2 pekerja per usaha.

UMK  
SEBAGAI  
PENYERAP  
TENAGA  
KERJA  
TERBANYAK

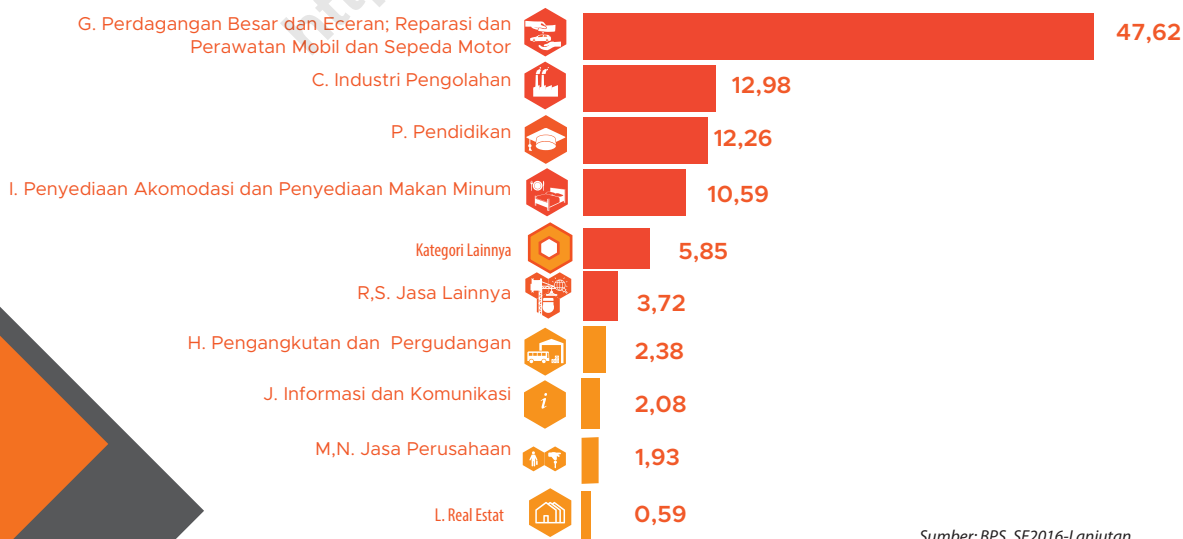


Gambar 2.1.  
Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, Sakernas

Gambar 2.2.  
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Tabel 2.****Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2016**

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
C. Industri Pengolahan	88 799	217 186	2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	443 460	796 454	2
H. Pengangkutan dan pergudangan	28 648	39 817	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	94 429	177 177	2
J. Informasi dan Komunikasi	22 600	34 786	2
L. Real Estat	7 887	9 816	1
M,N. Jasa Perusahaan	11 140	32 318	3
P. Pendidikan	18 369	205 096	11
R,S. Jasa Lainnya	33 120	62 276	2
Kategori Lainnya	22 180	97 726	4

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



---

**PENGELOLAAN  
UMK  
DILAKUKAN  
SECARA  
SEDERHANA**

---

Bagian

**3**

<https://lampung.bps.go.id>

## PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

UMK di Provinsi Lampung memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat

Dari data SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukum dan penggunaan teknologi. Di Provinsi Lampung, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai 92,86 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga

bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet masing-masing 4,77 persen dan 8,17 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 5 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

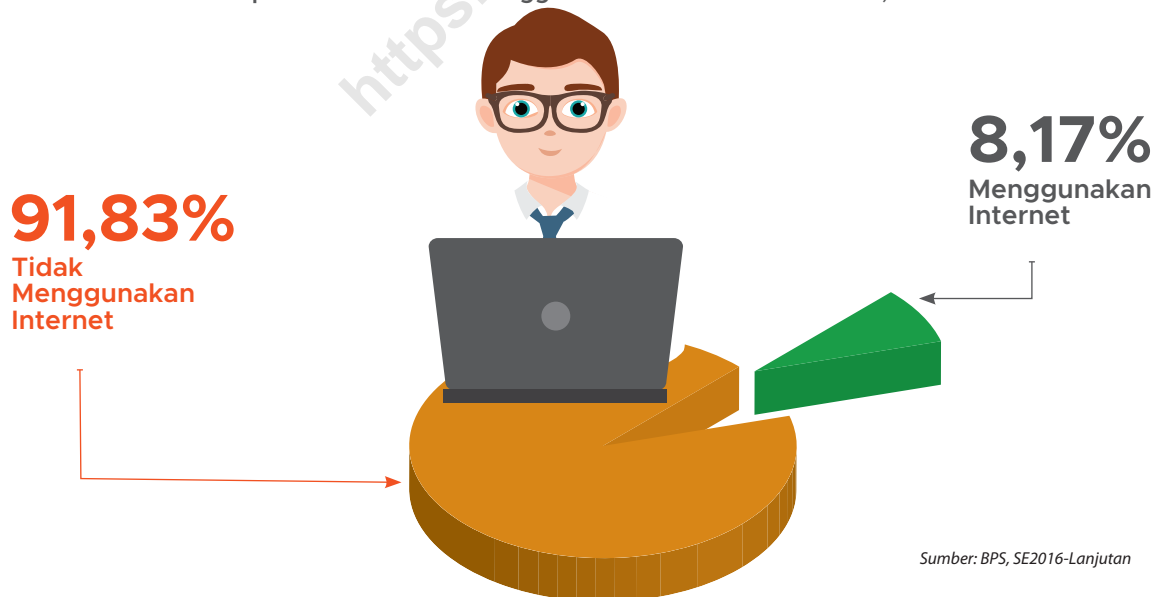
Di antara sektor nonpertanian di Provinsi Lampung, UMK Aktivitas Pendidikan dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

Gambar 3.1.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet Dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

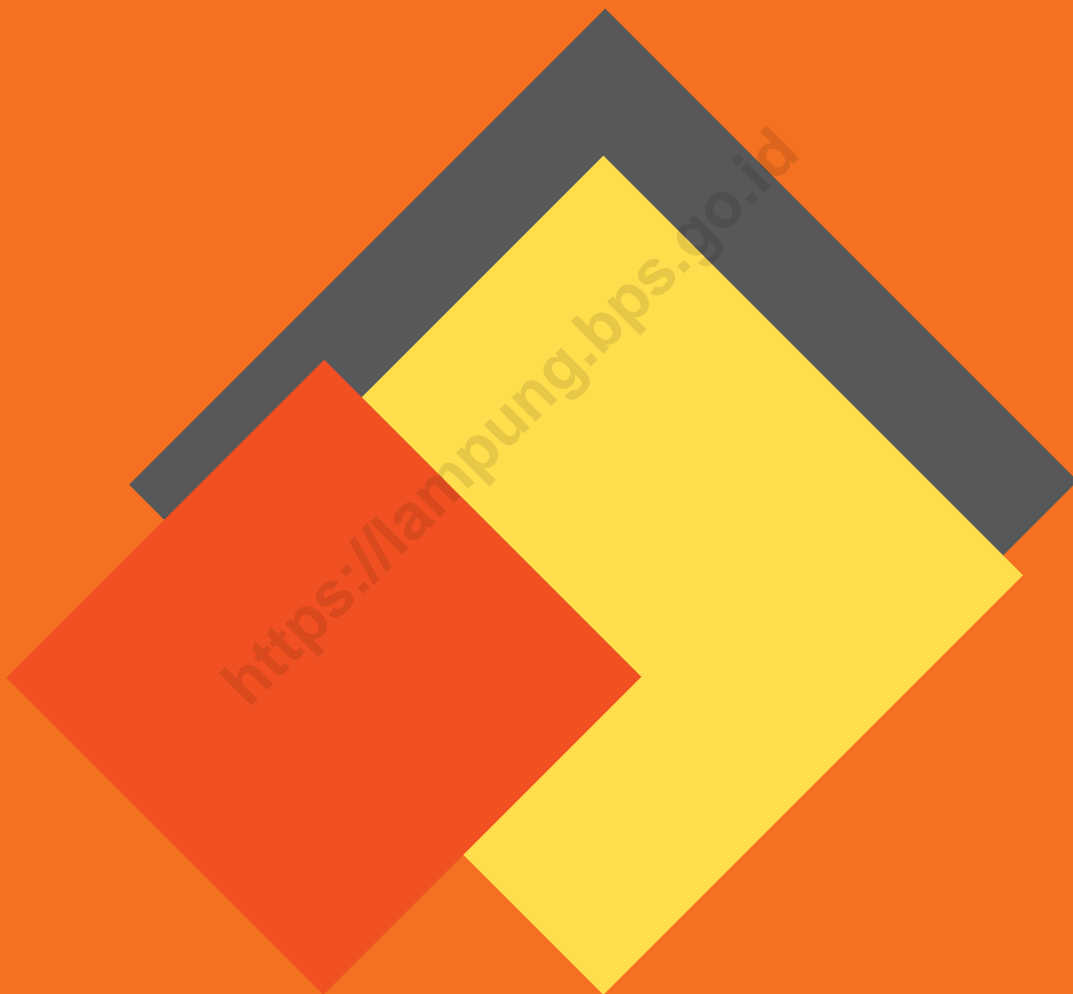
Tabel 3.  
 Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer,  
 Menggunakan Internet, dan Menjalinkan Kemitraan, 2016

Kategori	Berbadan Usaha <sup>1</sup>	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalinkan Kemitraan
C. Industri Pengolahan	0,75	2,16	5,72	5,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0,57	1,81	5,56	4,59
H. Pengangkutan dan pergudangan	1,07	1,75	5,92	3,44
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0,54	0,92	2,68	1,75
J. Informasi dan Komunikasi	0,89	18,12	28,50	7,42
L. Real Estat	0,57	1,19	3,58	0,18
M,N. Jasa Perusahaan	3,23	30,36	26,19	10,64
P. Pendidikan	31,52	63,93	57,72	11,29
R,S. Jasa Lainnya	0,85	7,11	11,65	3,35
Kategori Lainnya	6,13	17,12	22,07	10,43

Catatan : <sup>1</sup> Status berbadan usaha kondisi tahun 2017

Sumber: BPS, SE2016-L





<https://lampung.bps.go.id>



---

**PELAKU  
UMK  
PERLU  
MENINGKATKAN  
KAPABILITAS**

---

Bagian

**4**

<http://lampung.bps.go.id>

**S**alah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 21,89 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Informasi dan Komunikasi (Kategori J) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G).

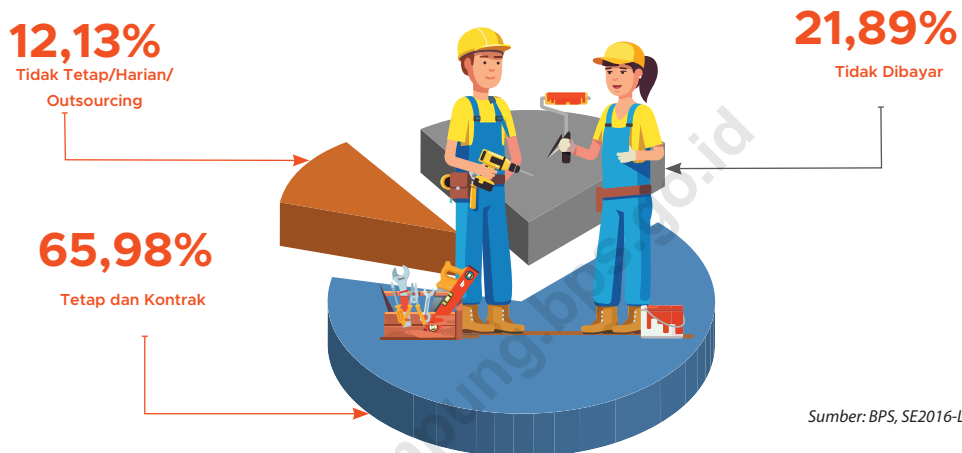
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 40,91 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya stereotipe bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama.

Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Sekitar 33,71 persen pengelola berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK juga cukup besar mencapai 32,50 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti, misalnya dengan memberikan pelatihan.

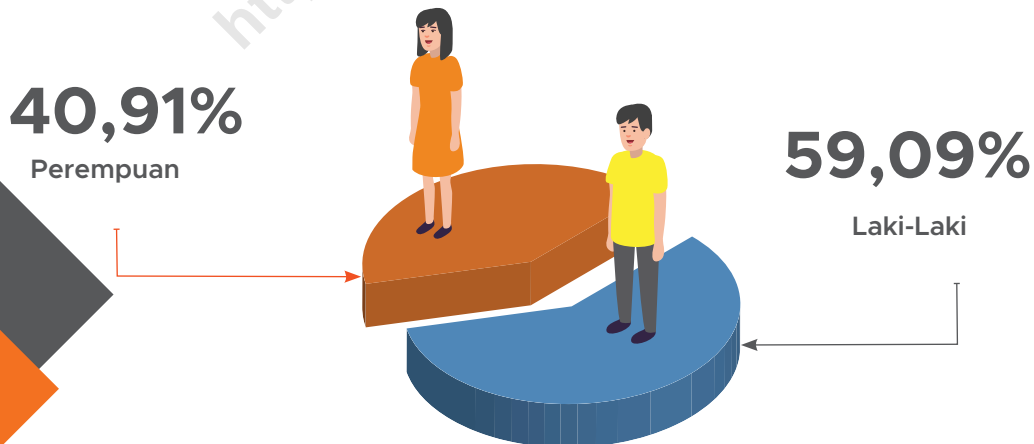
**PELAKU  
UMK  
PERLU  
MENINGKATKAN  
KAPABILITAS**

Gambar 4.1.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Pekerja, 2016



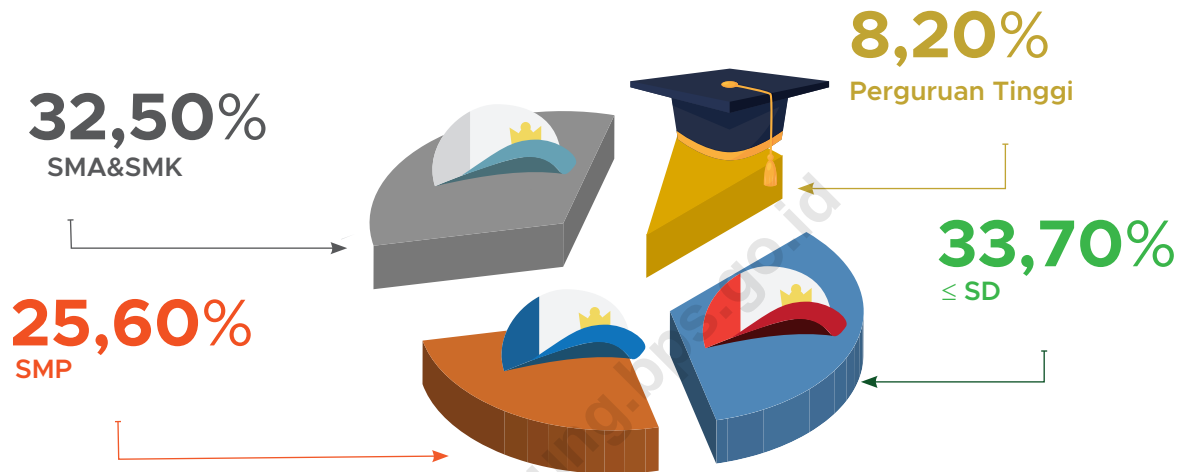
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.  
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.  
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja, 2016

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian / Outsourcing	Tidak Dibayar	Total
C. Industri Pengolahan	54,30	21,51	24,19	100,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	63,36	7,68	28,96	100,00
H. Pengangkutan dan pergudangan	81,27	14,08	4,65	100,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	65,22	7,00	27,78	100,00
J. Informasi dan Komunikasi	70,09	2,07	27,84	100,00
L. Real Estat	81,59	2,52	15,89	100,00
M,N. Jasa Perusahaan	59,61	29,53	10,86	100,00
P. Pendidikan	89,60	6,88	3,51	100,00
R,S. Jasa Lainnya	69,43	20,43	10,14	100,00
Lainnya	55,72	40,48	3,80	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

---

**KINERJA  
USAHA  
DARI SISI  
KEUANGAN**

---

Bagian

**5**

<https://lampung.bps.go.id>

## KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

**K**inerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya dilihat dari ukuran laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Lebih dari seperempat pengusaha UMK di Provinsi Lampung menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor UMK di wilayah Provinsi Lampung mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp141,69 triliun.

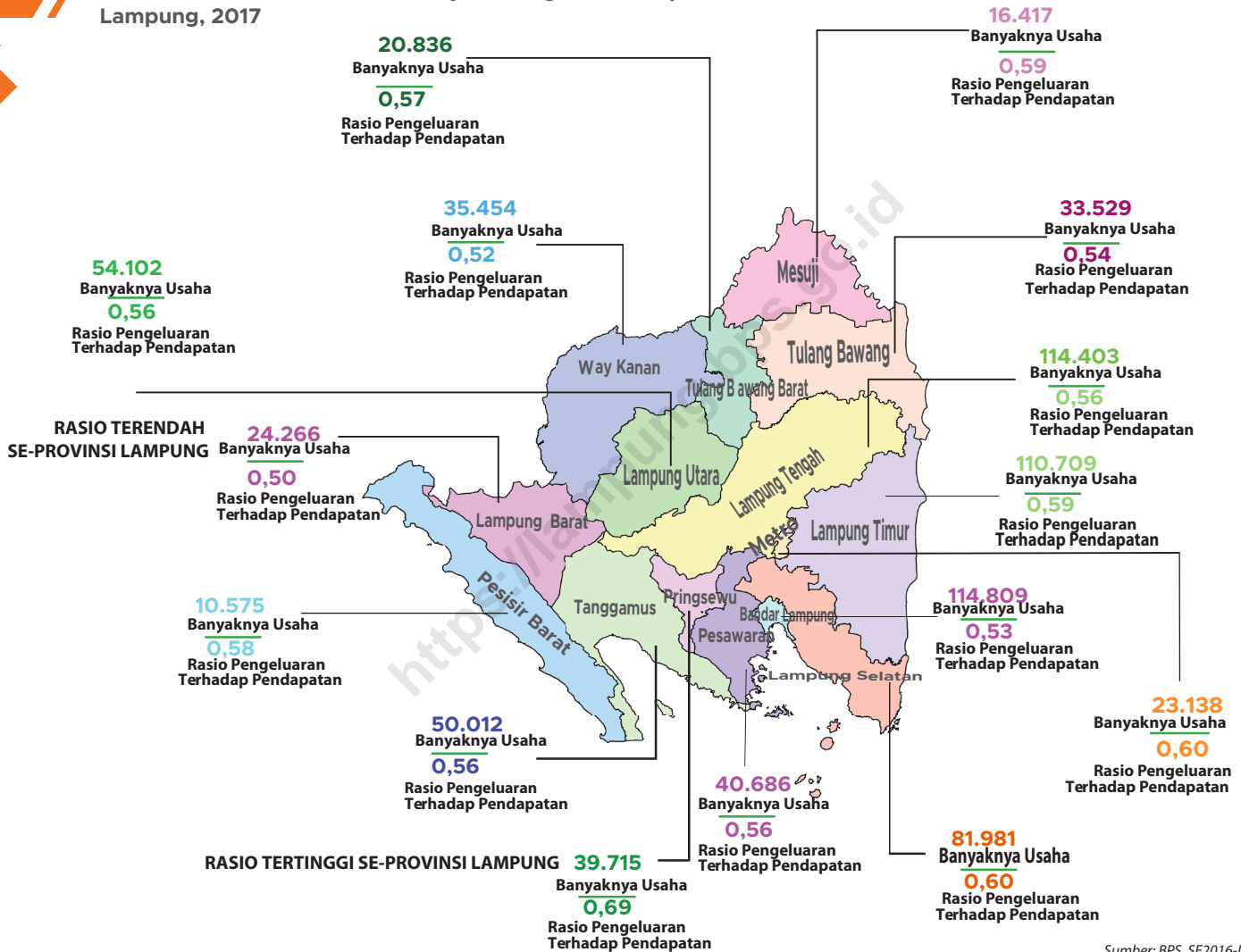
Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada infografis dapat terlihat bahwa UMK di Kabupaten Lampung Barat adalah yang paling *profitable* di Provinsi Lampung dengan rasio 0,50. Sektor UMK di provinsi ini mampu mengais keuntungan hingga nyaris dua kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di Kabupaten Pringsewu dengan rasio 0,69.

Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, kategori L (Real Estat) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,20 dan 0,31. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi ada pada Kategori Pendidikan dengan rasio mencapai 0,89.

Namun demikian, Kategori L, dan G bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 21 juta per pekerja. Selanjutnya, Kategori P (Pendidikan) memberikan balas jasa lebih dari 20 juta per pekerja. Sementara Kategori F (Konstruksi) dan K Aktivitas Keuangan dan Asuransi juga memberikan sumbangan balas jasa tinggi sekitar 18 juta per pekerja.

Gambar 5.1.  
Peta Sebaran UMK Menurut Kinerja Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi  
Lampung, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

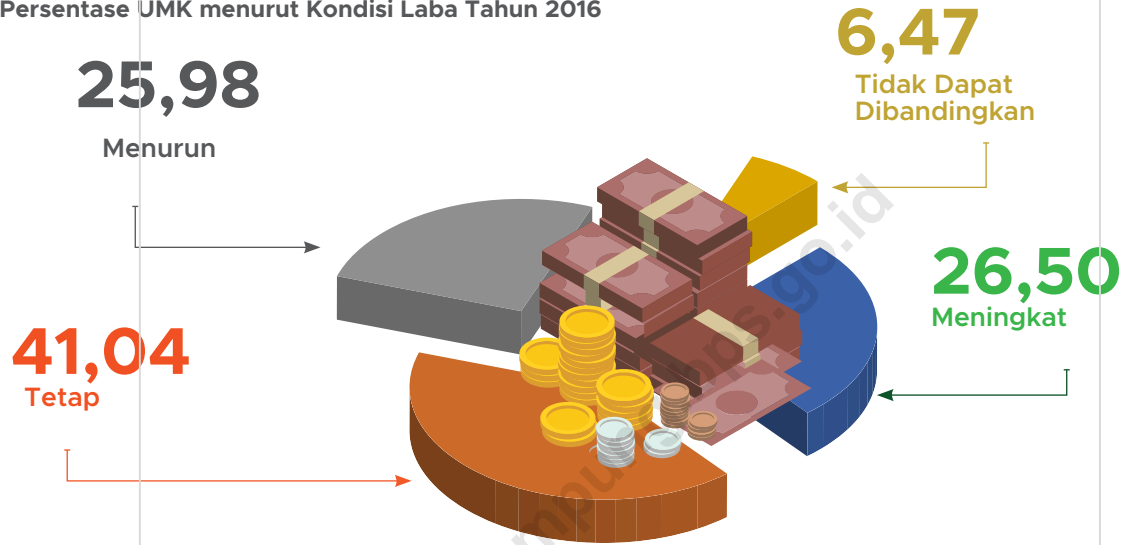
**Catatan:**

Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menunjukkan tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin menguntungkan atau semakin baik kinerja keuangannya.

Pringsewu merupakan kabupaten dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi se-Provinsi Lampung.

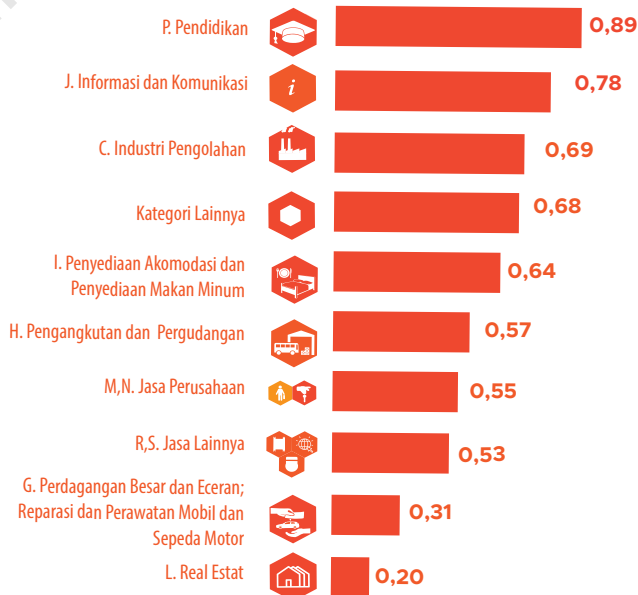
Sedangkan Lampung Barat merupakan kabupaten dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah se-Provinsi Lampung.

Gambar 5.2.  
Persentase UMK menurut Kondisi Laba Tahun 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.3.  
Rasio Pengeluaran terhadap pendapatan menurut Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

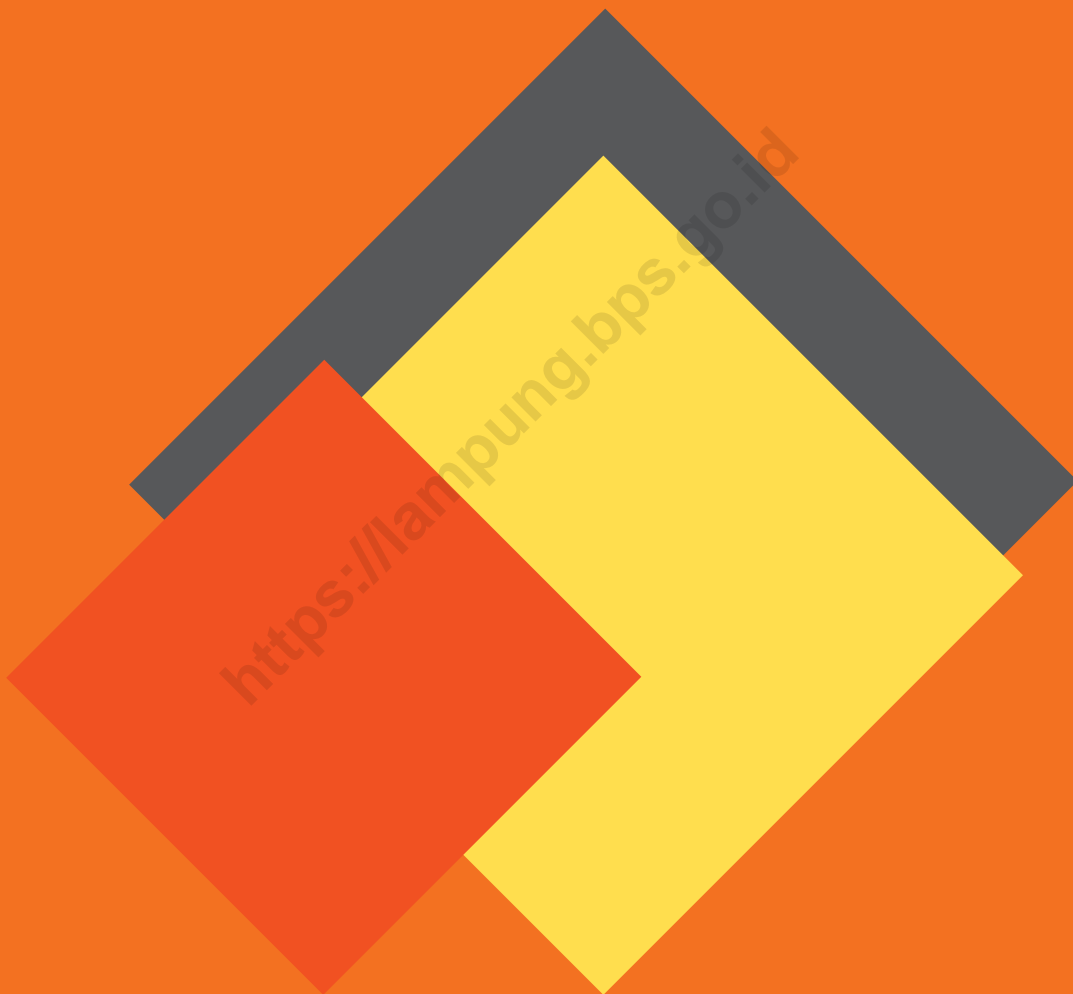


Tabel.5.  
Rata-rata Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut  
Kategori (Ribu Rupiah), 2017

Kategori	Rata -Rata Balas Jasa & Upah Pekerja
C. Industri Pengolahan	11 426
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	10 810
H. Pengangkutan dan pergudangan	15 459
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	12 103
J. Informasi dan Komunikasi	8 868
L. Real Estat	5 708
M,N. Jasa Perusahaan	9 832
P. Pendidikan	20 797
R,S. Jasa Lainnya	9 735
<b>Lainnya</b>	<b>19 104</b>
<b>Total</b>	<b>14 820</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





<https://lampung.bps.go.id>

---

**PROSPEK  
DAN  
KENDALA  
USAHA**

---

<https://lampung.bps.go.id>

Bagian

**6**

**R**PJMN 2005-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 45 persen.

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Indonesia 79,77 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya pesaing dan permasalahan permodalan/likuiditas merupakan kendala utama yang dihadapi. Masing-masing sekitar 51,80 dan 45,48 persen pengusaha UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 10,65 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan utamanya adalah karena 48 persen merasa belum perlu untuk mengajukan kredit. Sedangkan bagi pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan/mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.

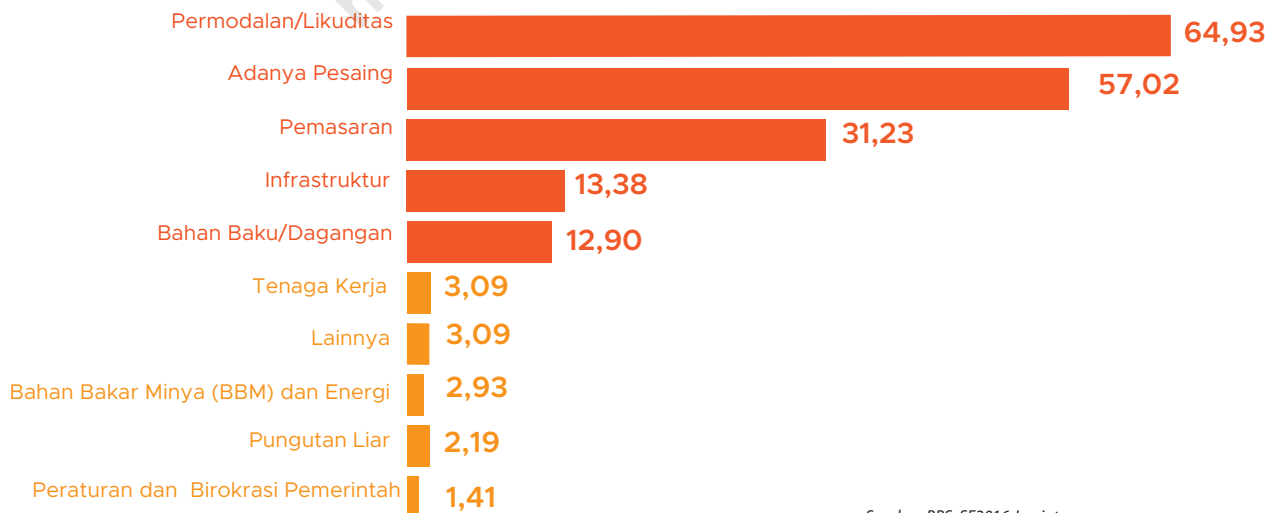
**PROSPEK  
DAN  
KENDALA  
USAHA**

Gambar 6.1.  
 Persentase UMK Menurut Prospek UMK Mendatang, 2018



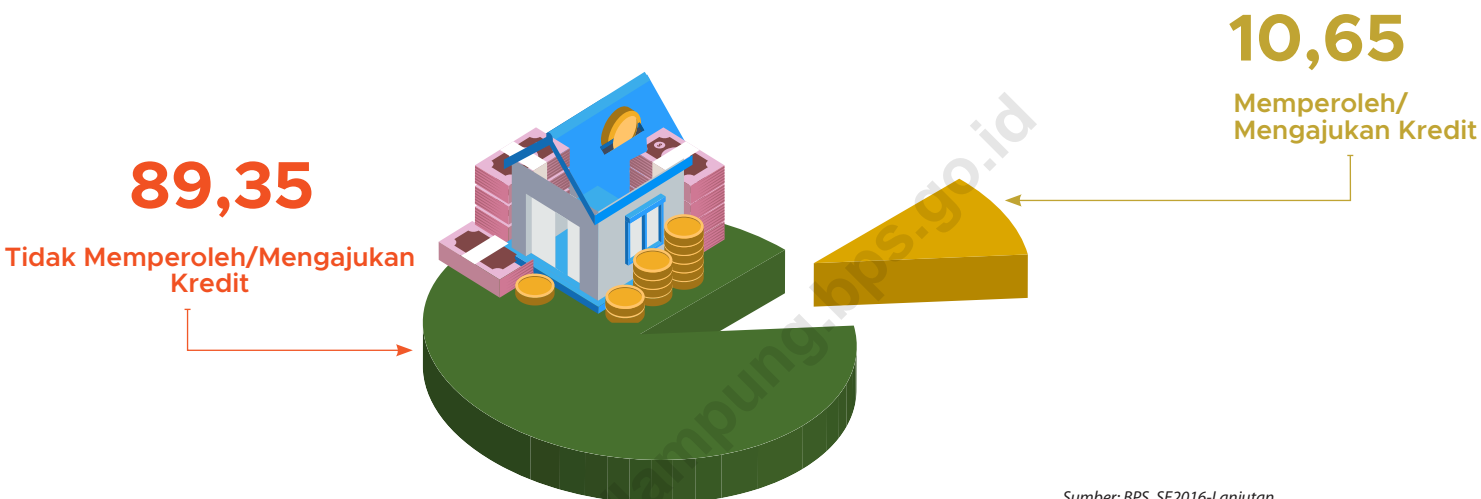
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.2.  
 Presentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2017



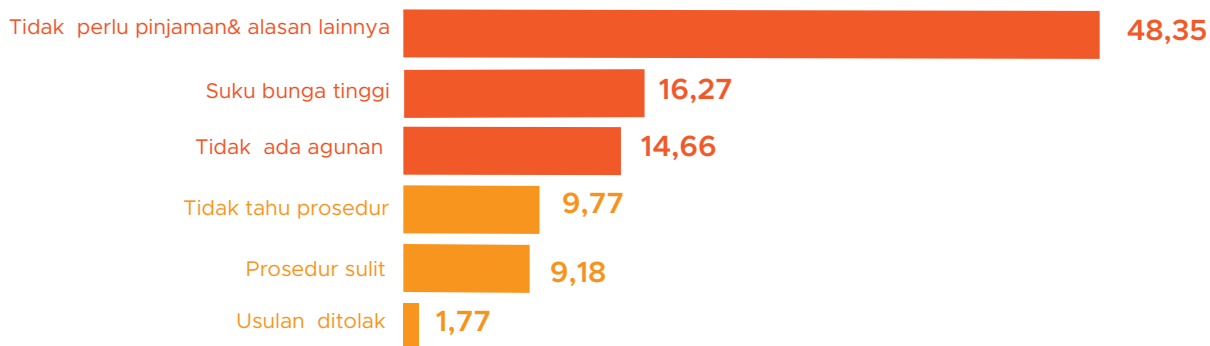
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.3.  
 Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2016

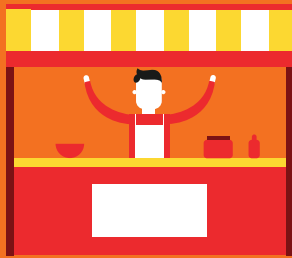


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

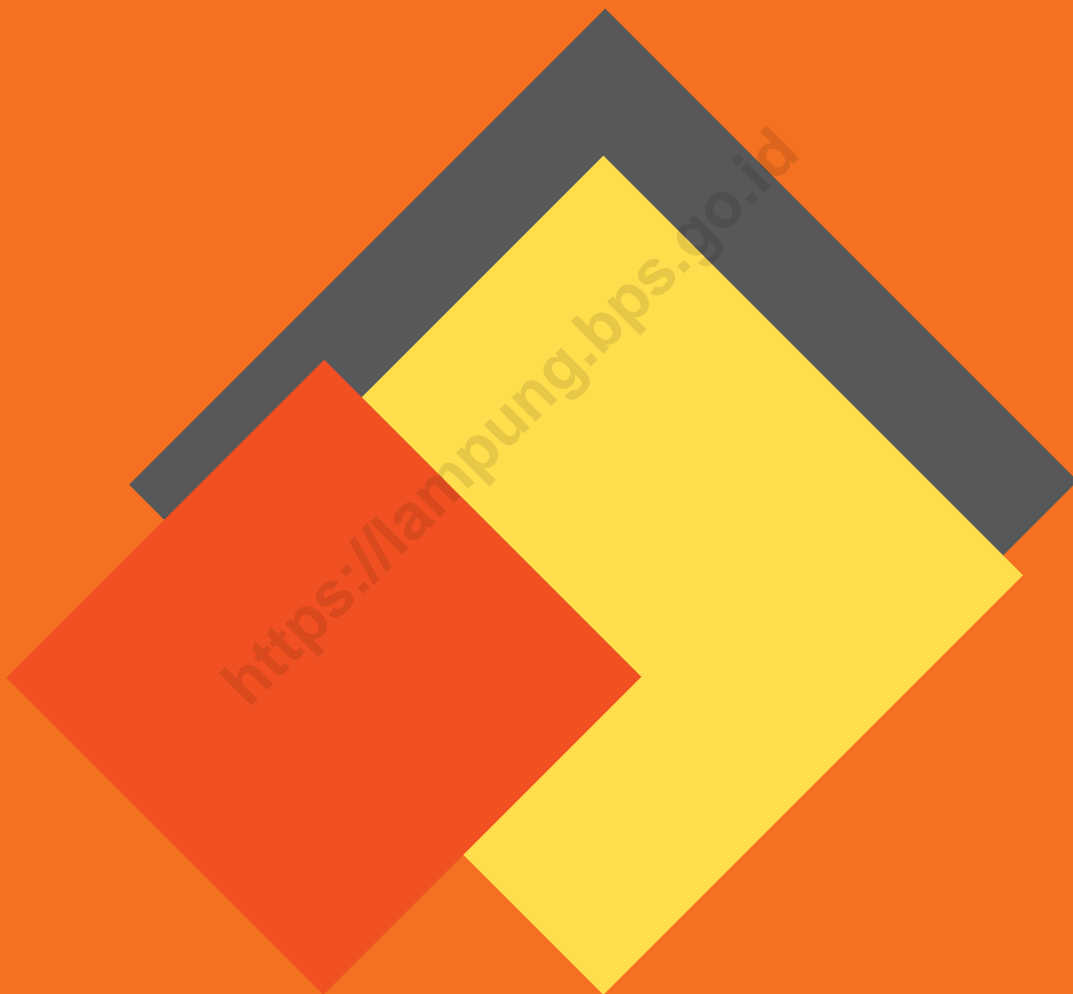
Gambar 6.4.  
 Presentase UMK Yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



<https://latihan.bps.go.id>



<https://lampung.bps.go.id>





# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54. Teluk Betung Bandar Lampung, 35215  
Telp : (0721) 482909, Fax : (0721) 484329

Homepage : <https://lampung.bps.go.id> E-mail : [bps1800@bps.go.id](mailto:bps1800@bps.go.id)

ISBN 978-602-7746-16-9



9

786027

746169